

Pembangunan Demokrasi Pasca Konflik di Aceh

Oleh
Alfon Kimbal¹

Abstract

Tulisan ini akan mengulas tentang pembangunan di Aceh pasca Konflik antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sangat berdampak pada kondisi dan kelangsungan hidup masyarakat Aceh. Tulisan ini akan menggunakan kacamata pembangunan internasional, dan akan dibagi menjadi tiga bagian, yang pertama adalah bagian pendahuluan yang akan membahas mengenai sejarah singkat konflik di Aceh, mengapa terjadi, bagaimana masyarakat sipil yang selalu menjadi korban dalam pertikaian ini, dan akhirnya disepakatinya perjanjian damai antara kedua belah pihak pada tahun 2005. Bagian analisis akan mengeksplorasi usaha-usaha pembangunan di Aceh baik oleh pemerintah domestik maupun kerjasama bantuan dari pihak asing, baik yang mewakili negara, organisasi Internasional seperti PBB, maupun NGOs. Dalam hal ini akan dilihat keefektifan kerjasama antara pemerintah domestik dengan bantuan-bantuan dari pihak asing tersebut bagi pembangunan di Aceh. Kemudian akhirnya kesimpulan.

Kata Kunci: Demokrasi, Pembangunan Internasional

PENDAHULUAN

Konflik vertikal Aceh punya akar sejarah panjang. Akar konflik berkait erat dengan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan elit sosial Aceh. Mulai dari masa penjajahan Belanda dan Jepang, peristiwa-peristiwa awal kemerdekaan, pemberontakan pada masa pemerintahan presiden Soekarno, dan peristiwa konflik antara GAM dengan Pemerintah Indonesia pada 1976-2005. Konflik ini telah mengakibatkan kerugian yang luar biasa di kedua belah pihak. Selain kerugian harta, juga kerugian sosial dan psikologis yang luar biasa bagi masyarakat Aceh. Bukan hanya dari pihak TNI/Polri dan GAM, tapi juga dialami oleh jutaan warga sipil yang tidak berdosa. Telah banyak laporan dan analisis, baik yang bersifat akademik maupun advokasi dari berbagai pihak baik dari dalam dan luar negeri mengenai konflik kekerasan antara TNI dan GAM.

¹ Staf Pengajar Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

Amnesty International (AI) menyatakan sedikitnya antara 10 ribu sampai 30 ribu orang terbunuh selama konflik Aceh sejak pertengahan 1970-an sampai perjanjian damai ditandatangani pada 2005, dan banyak diantaranya warga sipil. Selama kurun waktu tersebut terdapat serangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan dan pendukungnya, termasuk pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, pemindahan paksa warga sipil, penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang atas mereka yang diduga mendukung GAM. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) juga dilakukan oleh GAM di antaranya dalam bentuk penculikan dan pembunuhan terencana pada orang yang diduga informan, pejabat pemerintah dan pegawai negeri.

Jika kita melihat ke belakang, timbulnya konflik tersebut dilatarbelakangi oleh kekecewaan rakyat Aceh atas ketidakadilan pemerintah pusat RI. Kekecewaan ini disebabkan oleh dua hal, *pertama*, penolakan pemerintah RI terhadap keinginan masyarakat Aceh untuk menerapkan syariat Islam. *Kedua*, ketidakadilan pemerintah RI terhadap masyarakat Aceh dalam hal bagi hasil atas pengolaan sumber daya alam di Aceh. Tidak bisa dipungkiri, beberapa eksplorasi SDA di Aceh memberikan keuntungan yang berlimpah. Pada 1969 di Arun ditemukan ladang gas yang depositnya diperkirakan dapat dieksplorasi selama 30 tahun. Dengan nilai produksi rata-rata pertahun US\$ 31 miliar. Selain itu masih terdapat berbagai industri seperti PT. Pupuk Iskandar Muda, PT Aceh Asean Fertilizer, dan PT Kraft Aceh. Tak kalah besarnya, produksi hutan Aceh juga melimpah. Pada tahun 1997 mencapai Rp 1 triliun pertahun. Namun, sekali lagi melimpahnya kekayaan di atas tidak memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat Aceh.

Pada saat masyarakat dihimpit oleh dua kekuatan bersenjata yang saling berperang, masyarakat Aceh menjadi sangat menderita, dan pada saat itu tidak ada kelompok yang mendukung mereka. Masyarakat “dipaksa” untuk mendukung pemerintahan Indonesia di satu sisi, namun di sisi lain akan menjadi “terancam” oleh GAM, dan begitu sebaliknya. Pada masa itulah masyarakat menjadi sangat trauma dengan konflik, dan trauma inilah yang paling sulit disembuhkan. Seringkali masyarakat meragukan perubahan-perubahan politik yang terjadi: apakah akan membuat keadaan lebih baik, atau justru menjadi lebih buruk.

Sehingga, masyarakat Aceh yang sebagian besar tinggal di pedesaan, di tepi hutan dan pantai, seringkali memilih menunggu akan adanya jaminan keamanan bagi kelangsungan hidup mereka, daripada terlibat aktif dalam proses-proses politik yang sedang terjadi.

Dalam kenyataan untuk mewujudkan perdamaian di Aceh pemerintah Indonesia sudah menempuh perjalanan panjang bahkan di setiap periode kepemimpinan di Negara ini memiliki kekhasan dalam menyelesaikan konflik di Aceh, baik dari era Soekarno sampai pada SBY pun memiliki perbedaan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dalam kepemimpinan SBY ini pemerintah diuntungkan dengan bencana alam yang terjadi di Nangroeh Aceh Darusalam. Musibah tsunami 26 Desember 2004 telah turut mengambil peran untuk mendamaikan para pihak yang bertikai. Musibah tersebut menuntut pemerintah dan GAM untuk lebih memikirkan solusi damai dalam menyelesaikan pemberontakan bersenjata di Aceh. Pemerintah Indonesia kembali membuka dialog perdamaian dengan tokoh-tokoh GAM. Puncaknya adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menkumham Hamid Awaludin dengan perwakilan dari GAM yaitu Malik Mahmud selaku Pimpinan Delegasi GAM, dan sebagai fasilitator yaitu Martti Ahtisaari yang merupakan mantan Presiden Finlandia selaku ketua dewan direktur Crisis Management Initiative, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya pembangunan pasca konflik tujuan utamanya adalah untuk meredakan konflik kemudian tujuan pembangunan. Dalam kasus di Aceh konflik yang terjadi adalah konflik domestik antara GAM (Gerakan Aceh merdeka) dan pemerintah pusat. Dari tahun 1976 baru terjadi kesepakatan damai antara keduanya yaitu tahun 2005. Jadi selama hampir 30 tahun negosiasi antara kedua belah pihak tidak pernah mendapatkan kesepakatan damai. Selain karena bencana Tsunami yang melanda Aceh, kesepakatan damai ini juga tidak bisa di pungkiri karena keterlibatan pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah NGO Henry Dunant Center (HDC). Posisi netral NGO membuatnya lebih mudah diterima sebagai

mediator dengan dasar bahwa NGO akan sulit untuk menjadikan salah satu kelompok yang berkonflik merasa terancam. Netralitas inilah yang membuatnya lebih bijak dalam upaya mereka untuk menciptakan proses solusi damai. Beberapa alasan itulah yang menyebabkan mengapa baik pihak Pemerintah Indonesia maupun GAM lebih memilih NGO HDC daripada PBB atau ASEAN. Semula, pihak pemerintah Indonesia menginginkan pihak ketiga yang menjadi mediator dalam memfasilitasi berbagai perundingan dengan GAM adalah organisasi regional di tingkat Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Permintaan ini ditolak oleh GAM karena curiga terhadap Malaysia dan Singapura yang kemungkinannya akan lebih cenderung memihak pemerintah Indonesia dan memojokkan GAM. Sebaliknya, GAM menginginkan pihak ketiga yang menjadi mediator dalam perundingan untuk menyelesaikan konflik di Aceh adalah PBB. Permintaan ini juga ditolak oleh Pemerintah Indonesia karena trauma dengan apa yang telah terjadi di Timor Timur. Intinya kedua belah pihak menginginkan pihak ketiga yang akan menjadi penengah dan tidak memiliki power dan kewenangan yang kuat untuk menekan dan mengurangi kewenangan Pemerintah RI atau GAM. Kedua belah pihak kemudian sepakat untuk memilih HDC. Alasan dipilihnya HDC karena lembaga ini tidak partisan, profesional dan tidak memihak. Jadi keterlibatan pihak yaitu NGO Henry Dunant Center (HDC) sebagai mediator memberikan hasil positif dengan disepakatinya perjanjian damai antar pemerintah Indonesia dan GAM.

Dalam kacamata pembangunan internasional, khususnya pembangunan pasca konflik, penyebab konflik seringkali terjadi karena persoalan perebutan sumber daya alam. Hal ini juga terjadi dalam kasus Aceh yaitu karena merasa terjadi ketidakadilan pemerintah RI terhadap masyarakat Aceh dalam hal bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di Aceh. Jadi, langkah strategis untuk mengurangi atau menangani konflik yaitu melalui pembangunan ekonomi tetapi prasyaratnya yaitu kestabilan. Konflik harus lebih dulu redakan. Dalam kasus Aceh, setelah disepakatinya perjanjian damai (MOU), hal itu bisa menjadi salah satu tolak ukur bahwa konflik sudah berhasil di redakan. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa, potensi-potensi konflik masih akan terus ada, misalnya konflik lokal di Aceh karena masalah bantuan dan Pilkada terus bertambah hingga

mencapai angka tertinggi yaitu 118 kasus pada tahun 2005. Jadi manajemen konflik harus benar. Dalam hal ini kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sangat penting, karena pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, keterlibatan civil society sangat *urgent*. Jadi, semua aktor yg harus bersama-sama untuk membicarakan pembangunan pasca konflik, terutama aktor domestik. Tetapi berdasarkan data yang ada, Pascakonflik, peran dan keterlibatan masyarakat sipil cenderung dipinggirkan dalam proses pembangunan Aceh. Masalah itu mencuat dalam pertemuan tokoh masyarakat sipil dengan mediator perdamaian Aceh, Martti Ahtisaari, pada November 2009. Saat perundingan damai berlangsung, elemen sipil tidak terlalu dilibatkan lagi. Hanya pihak pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang terlibat penuh. Padahal, GAM tidaklah menjadi representatif masyarakat Aceh. Menurut beliau "Tidak mungkin perkembangan proses perdamaian bisa maksimal tanpa melibatkan civil society secara penuh".

Akhirnya yang menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia pasca penandatanganan MOU tersebut adalah pembangunan pasca konflik tersebut. Karena dalam hal ini pembangunan tidak hanya berupa pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga yang paling penting adalah pembangunan masyarakat.

Seperti halnya konflik yang terjadi dimana pun juga, konflik internal di Aceh memiliki dampak serius terhadap masalah kemanusiaan dan mendapatkan perhatian Internasional. Mereka yang menjadi korban sebagian besar bukanlah mereka yang terlibat secara langsung dalam konflik melainkan warga sipil. Masyarakat Internasional melalui berbagai organisasi internasional seperti UNHCR, ICRC, WHO, sampai dewan keamanan PBB memberikan perhatian terhadap konflik Aceh. Pada 2003, PBB pada waktu itu menganggarkan dana kemanusiaan untuk Aceh sebesar US\$55 juta. Dana bantuan kemanusiaan juga diberikan oleh pihak-pihak lain, seperti Jepang, Uni Eropa, dan Bank Dunia. Kemudian Amerika Serikat (AS) selain bantuan tsunami di Aceh tahun 2004. Juga pada tahun 2005 memberikan bantuan senilai US\$14 juta untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan guru di Aceh. Kemudian ada juga bantuan-bantuan lain yang datang dari pihak asing baik mewakili negara,

organisasi internasional, maupun NGO. Tetapi yang sangat disayangkan begitu banyak bantuan yang datang, tetapi saat itu kapasitas pemerintah masih sangat lemah dan menjadi tidak maksimal, karena fokusnya terbagi dengan masih disibukkan tentang bagaimana meredakan konflik di Aceh tersebut. Sehingga bantuan-bantuan yang datang menjadi tidak efektif karena pemerintah tidak bisa mengelola bantuan tersebut dengan baik.

PENUTUP

Konflik di Aceh sampai saat ini masih sangat rumit untuk mengeksplorasinya khususnya mengenai wacana-wacana yang tercipta bahwa terdapat juga campur tangan pihak asing dalam konflik tersebut, Ditambah lagi yang perlu diperhatikan dalam tulisan ini, hanya menganalisis dengan menggunakan pendekatan pembangunan internasional. Tetapi yang pasti, berdasarkan hasil analisis dari data-data yang ada, justru campur tangan pihak ketiga, yaitu NGO Henry Dunant Center (HDC) yang bisa menengahi kepentingan kedua belah pihak yang hampir selama 30 tahun tidak bisa disatukan, sehingga mencapai jalan damai yaitu lewat penandatanganan kesepakatan damai (MOU).

Kemudian yang menjadi tantangannya bagi pemerintah Indonesia sendiri adalah pembangunan pasca konflik tersebut. Karena dalam hal ini bukan hanya mengenai pembangunan infrastruktur tetapi juga yang paling penting adalah pembangunan masyarakat. Dalam kasus konflik di Aceh masyarakat adalah korbannya

Di tengah konflik ini, begitu banyak bantuan yang datang dari pihak asing, baik mewakili negara secara langsung, organisasi internasional seperti PBB, maupun NGO internasional. Tetapi permasalahannya adalah pemerintah domestik tidak bisa mengelola bantuan tersebut dengan baik, karena fokus pemerintah masih terbagi tentang bagaimana cara menangani konflik tersebut. Hal inilah yang terjadi dalam pembangunan di Aceh, bantuan-bantuan dari pihak asing menjadi tidak efektif sehingga tidak berdampak bagi pembangunan masyarakat Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Hadiwinata S. Bob & Shuck Christoph. 2010. *Demokrasi di Indonesia: Teori dan Praktek*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Huntington. P. Samuel (Terjemahan). 1997. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama

Ikrar Nusa Bhakti, 2008. *Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca Mou Helinski*. Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar.

Mansbach W. Richard & Rafferty Kirsten.2012. *Pengantar Politik Global: Introduction to Global Politics*. Bandung: Nusa Media.

Syamsul Hadi, et.al., 2007. *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal, dan Dinamika Internasional* . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

<http://www.indonesiamedia.com/2013/04/28/kucing-kucingan-dengan-militer-dan-gam/>

<http://www.conflictrecovery.org>

Rakyat Mereka Online (RMO.com (18 April 2013)

<http://pusdiklatbkt.wordpress.com/2013/01/18/analisis-konflik-dan-resolusi-konflik-di-aceh/>

Laporan Pemantauan Konflik di Aceh, 1 – 28 Februari 2007, World Bank/DSF
<http://www.tempo.co/read/news/2009/12/11/058213274/Pascakonflik-Peran-Masyarakat-Sipil-Aceh-Cenderung-Diabaikan>

<http://haluankepri.com/opini-/44937-bendera-gam-dan-rasa-kebangsaan.html>

<http://nrmnews.com/2013/01/20/amerika-serikat-berikan-bantuan-kemanusiaan-bagi-korban-banjir-di-jakarta/>

<http://www.merdeka.com/pernik/as-berikan-bantuan-us-14-juta-untuk-guru-aceh-ot7ext9.html>